

BAB I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan merupakan bagian yang bertujuan untuk memperkenalkan tesis. Bab ini akan mengurai latar belakang penelitian, menjelaskan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan paradigma penelitian. Selanjutnya, Bab ini juga akan mendeskripsikan struktur organisasi penulisan agar pembaca lebih mudah untuk dipahami struktur tesis ini.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, Bumi mendapatkan perhatian besar warga dunia seiring dengan berkembangnya isu-isu kerusakan lingkungan. Setidaknya terdapat 15 (lima belas) isu lingkungan hidup yang hangat menjadi perbincangan diberbagai pertemuan internasional. Isu-isu lingkungan tersebut diantaranya adalah polusi, pemanasan global, overpopulasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, asidifikasi laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam, polusi air, urban sprawl, masalah kesehatan masyarakat, dan rekayasa genetik. Lingkungan terus berubah. Bersamaan dengan itu, kesadaran atas lingkungan hidup meningkat karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia di Bumi. Manusia secara ekologis merupakan bagian dari lingkungan hidup (Sutrisno, 2013, hlm. 22), sehingga kerusakan pada lingkungan merupakan bagian dari kerusakan kehidupan manusia.

Indonesia memiliki kualitas lingkungan hidup yang relatif buruk. Indonesia termasuk 10 (sepuluh) negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia (Consultancy.uk, 2017; Khabibi, 2015). Contohnya, polusi udara lintas batas negara disebabkan kebakaran hutan dan gambut di Indonesia pada 2016. Dari tahun 2005 sampai 2016 jumlah bencana banjir, longsor dan kombinasi antara banjir dan longsor relatif meningkat (Kompas, 2017). Sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Lebih lanjut, kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir dan pasir besi, serta menjadi tempat pembuangan limbah. Setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan. Akibatnya jumlah daerah aliran sungai (disingkat, DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir

Fazli Rachman, 2018

*KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

(Messwati, 2012). Selain data yang telah dijabarkan diatas, banyak lagi data-data kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dijelaskan secara terperinci dalam latar belakang penelitian ini.

Kualitas lingkungan hidup Indonesia yang buruk tidak lepas dari kinerja pemerintah menyikapi permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan The Environmental Performance Index (disingkat, EPI) kinerja pemerintah Indonesia berada di peringkat ke 107 dari 180 negara di dunia dalam menyikapi persoalan lingkungan hidup (Hsu, 2016). Indeks tersebut didasarkan atas dua prioritas tinggi yaitu bidang perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan ekosistem. Padahal Pasal 31(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat, UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Lebih lanjut Pasal 31(4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Menurut Broere (2016, hlm. 245) lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota-kota sejak 2008, sedangkan penduduk di desa relatif stabil. Pertumbuhan populasi kota membawa tuntutan baru atas kesiapan tata letak kota, peningkatan keberlanjutan pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien (Broere, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik (2010) pada 2010 jumlah penduduk Kota Medan adalah 2.109.339 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,75%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan relatif yang tinggi tentu menjadi ancaman bagi lingkungan hidup. Terlebih lagi kurangnya kesadaran ekologis merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat perkotaan di Indonesia (Prasetyo, Budimansyah, & Roslidah, 2016, hlm. 3140).

Pertumbuhan penduduk kota harus diimbangi dengan sarana dan prasarana. Namun, pembangunan infrastruktur tidak bisa dipungkiri justru akan merubah alam dan tata ruang wilayah yang berakibat menurunnya daya dukung lingkungan hidup (Silalahi & Harianja, 2015). Akibatnya, muncul masalah-masalah lingkungan hidup lain seperti kurangnya air bersih, buruknya kondisi sanitasi, sampah, dan polusi udara akibat jumlah penduduk yang relatif tinggi (Kwanda, 2003; Silalahi & Harianja, 2015).

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Kualitas lingkungan hidup Kota Medan relatif buruk. Hasil Penelitian Badan Pelindung Lingkungan Hidup Amerika menunjukkan Kota Medan berada pada peringkat ke-4 (empat) kota paling berpolusi di dunia (Bangun, 2017; Harian Andalas, 2017; Panji, 2014). Salah satu penyebabnya adalah proporsi Ruang Terbuka Hijau (disingkat, RTH) yang tidak proporsional di Kota Medan. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (disingkat, UU Penataan Ruang) mengamanatkan proporsi RTH minimal 30% dari luar wilayah kota. Sementara, Kota Medan hanya memiliki 10% RTH dari wilayah Kota Medan (Agustyo, 2016; H. J. T. Hutapea, 2016). Padahal kebutuhan terhadap RTH terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Proporsi RTH tidak proporsional menyebabkan penurunan keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup (Silalahi & Harianja, 2015). Setidaknya, dalam 7 Tahun terakhir Kota Medan selalu dilanda banjir (Argus, 2017; Arisandy, 2013; Dahi, 2011; Karokaro, 2014; Panggabean, 2012; Shahab & Siregar, 2016; Susetio, 2015). Sungai Deli dan Sungai Belawan yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem saat ini telah tercemar akibat eksploitasi daerah pinggirannya yang tak terkendali (Bangun, 2017).

Lingkungan hidup merupakan hak konstitusional setiap orang. Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Jaminan tersebut dipertegas konsep pembangunan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan, sesuai dengan Pasal 31 (4) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (disingkat, UUPPLH) semakin mempertegas hak konstitusionalitas atas lingkungan hidup. UUPPLH menyebutkan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Oleh sebab itu, Pasal 3 huruf g UUPPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Fazli Rachman, 2018

***KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Penegasan penting lainnya dalam UUPLH tertampung pada Pasal 70. Pasal tersebut menegaskan hak, peran, dan kesempatan yang sama masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hal-hal tersebutlah, Kota Medan tidak hanya memerlukan sebuah konsep tata kota yang ramah lingkungan menyeimbangkan antara kebutuhan infrastruktur fisik dan keseimbangan ekologis. Namun juga, sebuah konsep pembangunan yang dilaksanakan hendaknya melibatkan warga negara sebagai objek dan subjek pembangunan. Pembangunan hendaknya berkelanjutan atas dasar kesadaran akan keterbatasan lingkungan, keadilan sosial dan ketahanan ekonomi.

Beberapa dekade terakhir, euforia “pembangunan” kehilangan perhatian publik. Pembangunan selama ini dinilai menghilangkan kewajiban untuk menghormati alam sebagai aset kehidupan untuk generasi berikutnya. Kemajuan ekonomi dan sosial justru meningkatkan kesadaran atas ancaman alam dan kecelakaan industri akibat eksploitasi alam yang berlebihan karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia dan bumi (Rachman, 2016; Unesco, 1996). Konsep Pembangunan Berkelanjutan (terj. *Sustainable Development*) hadir menjadi solusi untuk membangun dengan mengedepankan keseimbangan ekologi, keadilan sosial dan ketahanan ekonomi. Konsep tersebut hadir dan diresmikan sejak disahkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (terj. *Sustainable Development Goals*, disingkat SDGs) pada sidang umum PBB 25 September 2015.

Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan sumber daya yang dibutuhkan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya (Sauvé, Bernard, & Sloan, 2016; World Commission on Environment and Development, 1987). Pembangunan Berkelanjutan dianggap penting (Giddings, Hopwood, & O’Brien, 2002, hlm. 187) karena berfokus meningkatkan kehidupan masyarakat dan melindungi lingkungan. Berkelanjutan tersebut dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan antara negara dan antar warga negara (Hoelman et al., 2015, hlm. 14), serta bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengedepankan dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (United Nations, 2015, hlm. 3).

Menurut Ohlmeir (2013, hlm. 81, 2015, hlm. 6) selama periode 1990an, tiga dimensi Pembangunan Berkelanjutan tidak berhasil tanpa

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kondisi pemerintahan yang demokratis dan partisipasi aktif. Padahal, partisipasi warga negara untuk terlibat dalam mekanisme yang sangat luas sangat penting. Namun, demokrasi menjadi *empty formalism* tanpa ada kewarganegaraan, karena hanya sebatas kegiatan-kegiatan prosedural (Kalidjernih, 2011, hlm. xvi). Partisipasi warga negara dalam urusan publik adalah inti kesehatan demokrasi (Leavitt & Peacock, 2014). Masyarakat model seperti itu akan mengorientasikan tindakan ekologis, sosial dan ekonominya untuk menopang Pembangunan Keberlanjutan (Ohlmeier, 2013, hlm. 81).

Wacana-wacana Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya isu-isu teknis tentang pembangunan berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan, tetapi juga isu-isu politik dan budaya berkenaan dengan partisipasi warga negara pada tingkat praktis dan institusional (Kravale-Pauliņa & Olehnoviča, 2015). Tuntutan akan partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan telah mengubah paradigma mengenai posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Warga negara tidak lagi sebagai objek pembangunan menjadi subjek dari pembangunan (Prasojo, 2003, hlm. 1). Saat ini kebutuhan bertanggung jawab dan partisipasi warga meningkat seiring dengan demokratisasi dan pembangunan jangka panjang oleh masyarakat dan negara (Jurs, 2014, hlm. 265). Dengan demikian, perlu dibangun secara kontinu konstruksi sosial dalam wujud partisipasi warga negara (Prasojo, 2003, hlm. 1).

Kewarganegaraan bukan sekedar status hukum warga negara, melainkan membentuk keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam sebuah masyarakat republikan (terj. *republican citizenship*) (Dagger, 2002, hlm. 147; Robet & Tobi, 2014, hlm. 146). Setiap individu dijamin hak-haknya dan setiap warga negara berkewajiban berperan aktif sebagai pelayan dalam komunitas politik tersebut (Rohayani, 2016, hlm. 81). Keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam urusan publik untuk mencapai keadaban warga negara (*civic virtue*). Dalam masyarakat republik, partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik tidak sekedar hak dan kewajiban, melainkan esensi dari ikatan masyarakat (Winarno, 2009, hlm. 49).

Partisipasi warga negara penting dalam sistem demokrasi. Warga negara memegang kedaulatan tertinggi. Warga negara memiliki hak untuk ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban bagaimana pembangunan dilaksanakan. Hak-hak warga negara dimanifestasikan dalam bentuk praktik-praktik

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kewarganegaraan. Lebih dari itu, Partisipasi warga negara tidak hanya berhubungan dengan pengambilan kebijakan publik seperti pendapat Mize (dalam Mapuva, 2015, hlm. 406). Namun, perlu partisipatif yang jauh lebih luas, yang tidak terbatas pada institusi dan praktik politik formal (Glover, 2004, hlm. 66). Warga dapat berpartisipasi apabila memiliki pemahaman atas kepentingan mereka dalam komunitas yang lebih luas.

Partisipasi adalah proses dinamis yang direkonstruksi dalam kelompok sosial (Kovalainen & Kumpulainen, 2007, hlm. 143). Konstruksi sosial dalam wujud partisipasi warga negara merupakan kebutuhan yang sangat penting. Konstruksi sosial merupakan cara untuk pembentukan partisipasi warga negara di masyarakat. Karena terbentuk sebuah realitas individu (partisipasi, misalnya) merupakan proses dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu (Berger & Lockmann, 1990; Bungin, 2011, hlm. 15). Konstruksi muncul ketika orang mencoba memberi makna dalam sebuah aktivitas atau fenomena sosial (Haryatmoko, 2016, hlm. 7). Konstruksi sosial merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Berger & Lockmann, 1990; Bungin, 2011, hlm. 13).

Konstruksi sosial didasarkan atas pengetahuan dan kenyataan untuk memahaminya (Manuaba, 2008). Konstruksi sosial tidak selamanya diantara individu (Bungin, 2011, hlm. 212). Seiring dengan masyarakat yang semakin modern, konstruksi sosial ditambahkan variabel media massa yang mempercepat sirkulasi informasi dan luas, sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan cepat dan tersebar merata (Bungin, 2011, hlm. 194). Media massa dapat berupa surat kabar, film, radio, televisi dan sebagainya yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada khalayak ramai (Cangara, 2002).

Berger & Lockmann (1990, hlm. 47) menyebutkan pengetahuan masyarakat adalah pengetahuan bersifat keseharian yang terbentuk dan berkembang dimasyarakat melalui salah satunya wacana publik sebagai instrumen (*treatment*) konstruksi sosial. Konstruksi kesadaran partisipasi warga membutuhkan partisipasi warga negara (Kravale-Pauliņa & Olehnoviča, 2015, hlm. 95) dalam ruang-ruang alternatif diluar bentuk-bentuk partisipasi formal untuk berpartisipasi (Kalidjernih, 2011 hlm.

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

xvii). Sejalan dengan teori konstruksi sosial bahwa masyarakat merupakan produk individu dan individu merupakan produk masyarakat. Maka dapat juga warga negara secara individu dapat membentuk wacana publik di media massa sebagai salah satu sumber belajar Pendidikan Kewarganegaraan (disingkat, PKn) pada domainb sosiokultural untuk membangun partisipasi warga negara.

Wacana adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam urusan publik dan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Masyarakat dan wacana publik merupakan aspek yang benar-benar penting bagi pemerintahan yang demokratis (Heath, 1999). Wacana merupakan sebuah tindakan warga negara sebagai praksis sosial. Alih-alih hanya sebagai sebuah praksis sosial, lebih dari itu wacana menyediakan hasil analisis permasalahan sosial, memperhatikan struktur sosial yang ada, mengubah atau memperbaikinya (Haryatmoko, 2016 hlm. 5).

Pada tinjauan lain, Menurut Wahab & Sapriya (2011, hlm. 311) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizen*). Lebih praktis, menurut Branson (1999, hlm. 7) tujuan PKn adalah membentuk partisipasi warga negara. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya serta ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah publik. Sebagai individu, warga negara yang baik harus memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu dan berpartisipasi dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa partisipasi warga negara di bidang lingkungan salah satu ketercapaian tujuan PKn.

PKn untuk Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk menginformasikan dan pemberdayaan warga negara. Pkn untuk Pembangunan Berkelanjutan mendidik setiap warga negara untuk memiliki kemampuan untuk melibatkan pengetahuan dan keterampilan secara bertanggung jawab untuk partisipasi dalam pembangunan (Ohlmeier, 2015, hlm. 5). Karena partisipasi tersebut dapat pada tingkatan lokal dan global sambil tetap sadar akan kepentingan mereka sendiri (Giddings et al., 2002) diantaranya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PKn memiliki 3 (tiga) domain, yakni akademis, kulikuler, dan sosiokultural (Winarno, 2014, hlm. 7-8; Winataputra, 2015, hlm. 36). PKn pada domain sosiokultural pelaksanaannya lebih adaptif, dinamis dan luwes baik dalam nomenklatur, pengorganisasianm proses hingga pengalaman belajar. Domain sosiokultural PKn lebih berbaur dengan

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGANHIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kebutuhan bermasyarakat. Sementara menurut Cogan (dalam Budimansyah & Suryadi, 2008, hlm. 5) bahwa PKn lebih inklusif karena mencakup baik pengalaman di sekolah dan di luar sekolah atau pembelajaran nonformal/informal di keluarga, organisasi, masyarakat, media dan lain sebagainya. Luasnya kajian PKn saat ini, telah membentuk PKn sebagai kajian yang multifaset (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 97).

Penelitian ini akan menelusuri PKn dalam domain sosiokultural atau pengalaman belajar di luar sekolah. Penelitian ini mencoba mengeskplorasi wacana pembangunan berkelanjutan dalam prespektif mikro. Era informasi sangat berkembang dewasa ini, perlu pendekatan yang dapat membongkar wacana, strategi, menyerap setiap kejadian yang ditulis yang dikonstruksikan melalui media massa. Sebab, kelemahan dalam dimensi ini sangat mungkin menyebabkan individu dan masyarakat pada umumnya terjebak dalam pembacaan yang kaku. Sementara komunikasi melalui media, bukanlah terkadang realitas yang dikonstruksi, melainkan serangkaian informasi yang sudah diproduksi ulang sesuai dengan kepentingan penyampai pesan. Di sini pula Analisis Wacana Kritis menjadi relevan dalam pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Antoni, 2013, hlm. 47).

Analisis Wacana Kritis dalam penelitian PKn memberikan stimulus baru dalam pengembangan keilmuan (Antoni, 2013, hlm. 48) bagaimana wacana mengkonstruksi sosial berupa partisipasi warga negara. Wacana sebagai sebuah praktis sosial juga akan mempengaruhi baik pada dimensi kurikuler, keilmuan maupun sosiokultural PKn. Atas dasar latar belakang penelitian sebagaimana telah dijabarkan diatas maka menarik sekali untuk melakukan penelitian **“Konstruksi Partisipasi Warga Negara Dibidang Lingkungan dalam Wacana Pembangunan Berkelanjutan di Kota Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi, sebagaimana berikut ini:

1. Kualitas lingkungan Indonesia khususnya Kota Medan relatif buruk. Bersamaan dengan kualitas lingkungan yang buruk, kinerja pemerintah Indonesia pada bidang lingkungan relatif buruk. Lebih dari itu, kesadaran atas lingkungan hidup menjadi permasalahan masyarakat urban Indonesia.

Fazli Rachman, 2018

*KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2. Permasalahan lingkungan hidup di kota Medan secara kontinu, berulang dan rutin terjadi, seperti belum ada solusi efektif untuk mengurai dan memitigasi permasalahan lingkungan hidup.
3. Pembangunan di kota Medan belum memperhatikan keseimbangan ekologis, sosial dan ekonomi.
4. Penting pembangunan berkelanjutan sebagai solusi alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, dimana warga negara terlibat berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Membangun lingkungan hidup yang sehat dan baik memerlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang didasarkan keseimbangan ekologis, sosial dan ekonomi dimana warga negara terlibat dalam proses pembangunan.
6. Pembangunan kesadaran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri tetapi bersama dengan partisipasi warga negara.
7. Perlu sebuah pendekatan pada studi dan membelajarkan PKn pada dimensi sosiokultural untuk membentuk partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup.
8. Wacana sebagai sebuah partisipasi warga negara merupakan bahan konstruksi sosial belum mendapat perhatian akademisi sebagai PKn dalam dimensi sosiokultural. Lebih lebih menjadi salah satu sumber belajar PKn dalam membentuk partisipasi warga negara pada dimensi sosiokultural PKn. Padahal, wacana mampu merupakan sebuah kajian kewarganegaraan yang dapat memberi kontribusi yang besar untuk membangun keilmuan PKn.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Dari beberapa identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai pernyataan pertanyaan penelitian, berikut:

1. Mengapa partisipasi warga negara menjadi *order of discourse* dalam wacana pembangunan berkelanjutan pada artikel opini surat kabar di Kota Medan?
2. Mengapa *communicative events* wacana artikel opini pembangunan berkelanjutan dalam surat kabar harian di Kota Medan membangun konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup?

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Mengapa konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara melalui wacana pembangunan berkelanjutan membangun partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup?
4. Mengapa konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara melalui wacana pembangunan berkelanjutan membangun partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup dalam prespektif pendidikan kewarganegaraan?
5. Mengapa partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup merupakan hasil dan dampak konstruksi sosial melalui wacana pembangunan berkelanjutan?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelaborasi, mengeksplorasi dan menganalisis konstruksi partisipasi warga negara pada bidang lingkungan dalam wacana pembangunan berkelanjutan di kota Medan. Penelitian ini lebih didasarkan atas dua pertanyaan besar; kesatu, mengapa wacana pembangunan berkelanjutan dapat membangun partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup; dan mengapa konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara pada wacana pembangunan berkelanjutan dapat membangun partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup. Melihat atensi yang tinggi atas isu-isu lingkungan hidup, khususnya di Kota Medan sebagai wacana kewarganegaraan (*terj. civic discourse*). Perlu dilihat mengapa hasil dan dampak konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara dibidang lingkungan dalam wacana pembangunan berkelanjutan.

1.4.2. Tujuan Khusus

Untuk memberikan batasan tujuan umum penelitian di atas. Maka, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengeksplorasi mengapa partisipasi warga negara menjadi *order of discourse* dalam wacana pembangunan berkelanjutan pada artikel opini surat kabar di Kota Medan.
2. Mengidentifikasi mengapa *communicative events* wacana artikel opini pembangunan berkelanjutan dalam surat kabar harian di Kota Medan membangun konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup.

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Menganalisis dan mendeskripsikan mengapa konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara dalam wacana pembangunan berkelanjutan membangun partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup.
4. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi mengapa konstruksi sosial berupa partisipasi warga negara melalui wacana pembangunan berkelanjutan membangun partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup dalam prespektif pendidikan kewarganegaraan.
5. Mendeskripsikan mengapa partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup merupakan hasil dan dampak konstruksi sosial melalui wacana pembangunan berkelanjutan.

1.5. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi dapat diberikan dari hasil penelitian ini. Maka perlu dijelaskan manfaat penelitian yang dilihat dari beberapa segi, yaitu dari:

1.5.1. Segi Teori

Dalam sudut pandang teori penelitian ini akan memberikan sumbangsih akademis berdasarkan penelitian bagaimana wacana publik mengkonstruksi partisipasi warga negara dalam pembangunan berkelanjutan dibidang lingkungan hidup. Penelitian kiranya menjadi bahan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kesadaran pembangunan berkelanjutan untuk berpartisipasi menyesuaikan tuntutan kebutuhan pembangunan dengan keseimbangan ekologi, sosial, ekonomi.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya diseminasi penggunaan Analisis Wacana Kritis dalam penelitian Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Mendorong para akademisi untuk melakukan studi-studi kewarganegaraan (terj. *citizenship studies*) dan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiokultural atau pengalaman belajar di luar sekolah. Analisis Wacana Kritis memberikan stimulus baru dalam pengembangan dan memperkokoh keilmuan PKn.

Harapannya, penelitian ini akan mengisi kekosongan penelitian dan studi-studi konstruksi sosial melalui wacana publik dalam konteks/prespektif kewarganegaraan dan PKn relatif ini hampir tidak

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

ada. Sehingga memperkaya kajian dan konsep-konsep mutakhir dan multifaset sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini akan menjadi *stepping stone* penelitian-penelitian wacana publik dengan menggunakan analisis wacana kritis dalam bidang kajian tersebut kedepannya.

1.5.2. Segi Kebijakan

Manfaat dari segi kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan yang bersifat ilmiah bagi pemerintah untuk: kesatu, pengembang kebijakan dan pengambil keputusan alternatif berkaitan pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dimana kebijakan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi.

Kedua, menyiapkan arah kebijakan yang sesuai dengan konteks dinamika kewarganegaraan kekinian. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan ysesuai perkembangan yang sedang terjadi. Mengkorelasikan antara kepentingan dan percepatan pembangunan dengan prespektif pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, menyelaraskan konteks pembangunan berkelanjutan dengan kesadaran akan keterbatasan lingkungan, keadilan sosial dan ketahanan ekonomi. Membangun kesadaran dari keberlanjutan dengan membangun partisipasi warga negara dengan mengkonstruksinya melalui media massa. Keempat, menyiapkan sebuah kerangka konsep pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (terj. *Education for Sustainable Development*, disingkat ESD) khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuannya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan pemerintah. Globalisasi dewasa ini, wawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan mendapat perhatian lebih dalam pembangunan berikutnya. Kerangka kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum pendidikan yang menyiapkan warga Indonesia menjadi memiliki wawasan lingkungan dikemudian hari tanpa menghilangkan tanpa menghilangkan esesi pembangunan.

1.5.3. Segi Praktik

Dari segi praktik, Penelitian ini akan memberikan sumbangsih akademis dari sudut pandang kewarganegaraan dan Pendidikan

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Kewarganegaraan atas permasalahan lingkungan hidup kota Medan. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang jernih atas permasalahan masalah yang diperdebatkan khususnya konstruksi partisipasi warga negara dalam. Mengidentifikasi, mengelaborasi, dan mengeksplorasi wacana pembangunan berkelanjutan untuk melihat konstruksi partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup di kota Medan. Penelitian ini akan melihat dengan jernih dan berlatar belakang alamiah mengenai bagaimana konstruksi realitas sosial atas partisipasi warga negara di kota Medan khususnya dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sehingga diharapkan memberikan alternatif sudut pandang atau solusi dalam memecahkan masalah lingkungan hidup di kota Medan.

1.5.4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini menjadi salah satu alternatif menentukan arah aksi sosial mendukung untuk menyikapi isu permasalahan lingkungan hidup. Sebagai pijakan untuk menimbulkan wacana baru akan pentingnya warga negara dalam pembangunan berkelanjutan untuk kini dan masa yang akan datang. Terlebih lagi komitmen kewarganegaraan warga negara sebagai bagian dari bangsa Indonesia melalui aksi-aksi sosial. Penelitian ini menjadi awal bagaimana warga negara untuk memiliki komitmen yang bernalar (terj. *resoned commitment*) membentuk wacana-wacana pembangunan berkelanjutan sebagai wujud partisipasi sebagai wujud konstruksi sosial warga negara terhadap nilai-nilai dan prinsip demokrasi dan praktik-praktik kewarganegaraan sebagai aktor sosial.

1.6. Batasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang luas diatas, khususnya untuk membahas wacana pembangunan berkelanjutan. Peneliti menganggap luasnya diskusi wacana kebutuhan untuk membatasi wacana yang akan dibahas dalam penelitian ini, perlu dilakukan batasan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Wacana pembangunan berkelanjutan yang akan dikaji adalah wacana publik yang berasal dari artikel opini surat kabar harian di Kota Medan.
2. Penelitian ini akan mengkaji wacana dalam rentang waktu 2 (dua) tahun. Dimulai sejak *Sustainable Development Goals*, disingkat SDGs ditetapkan pada sidang majelis umum PBB pada Desember

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2015 dan berlaku pada 2016. Maka wacana yang akan dikaji terbagi dari 2 (dua) tahun pasca pembangunan berkelanjutan ditetapkan yaitu mulai 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2018.

3. Karena penelitian ini akan mengkaji partisipasi warga negara permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, maka wacana yang akan menjadi sumber data akan dipilih secara subjektif peneliti. Wacana-wacana yang membahas adalah wacana pembangunan berkelanjutan khususnya tentang isu-isu lingkungan hidup.

1.7. Paradigma Penelitian

Dari penjelasan diatas, dapat dibangun paradigma penelitian sebagai argumetasi penelitian sementara dalam penelitian ini. Paradigma penelitian merupakan pandangan sementara terhadap masalah penelitian. Perlu dipahami, dikatakan sementara karena penelitian harus tunduk dan patuh pada fakta-fakta empiris dan kondisi secara alamiah yang menjadi temuan-temuan penelitian. Karena sifatnya sementara dan harus tunduk pada fakta empiris yang alamiah, paradigma bersifat terbuka. Paradigma dalam penelitian kualitatif adalah rumusan dasar yang diyakini oleh peneliti untuk mengidentifikasi masalah penelitian dan memecahkan masalah tersebut. Paradigma berfungsi membimbing peneliti untuk melakukan inquiri, interpretasi, menyimpulkan dan mengabstraksi serta mengkonstruksi prinsip atau teori sebagai hasil penelitian (Muchtari, 2015). Maka, dalam penelitian ini, paradigma penelitian yang dibangun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wacana artikel opini surat kabar tentang pembangunan berkelanjutan menampilkan narasi yang membangun makna baik teks atau realitas dibalik wacana pada konteks perubahan sikap, perilaku dan kesadaran sosial atas lingkungan hidup. Wacana pembangunan berkelanjutan memperkuat nilai-nilai pelestarian lingkungan dan tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi atas dibidang lingkungan hidup.
2. Wacana artikel opini tentang pembangunan berkelanjutan memuat narasi-narasi yang meliputi aspek (1) alasan pentingnya warga negara berpartisipasi dibidang lingkungan hidup pada teks wacana; (2) kompetensi kewarganegaraan pada praktik wacana; dan (3) sosiokultural pada praksis sosiokultural wacana yang merupakan nilai nilai kewarganegaraan dalam PKn.

Fazli Rachman, 2018

*KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Wacana pembangunan berkelanjutan memuat pengetahuan masyarakat (*social shock of knowledge*) dan nilai-nilai tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi dibidang lingkungan hidup. Sedikitnya pada wacana artikel opini surat kabar harian di Kota Medan yang dikaji terbagi dari 2 (dua) tahun pasca pembangunan berkelanjutan ditetapkan yaitu mulai 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2018.
4. Pengembangan tanggung jawab dan partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup melalui konstruksi sosial, individu tumbuh berkembang dalam diri warga negara dengan “membaca” narasi-narasi wacana artikel opini tentang wacana pembangunan berkelanjutan.
5. Konstruksi sosial wacana pembangunan berkelanjutan dapat membangun partisipasi warga negara dibidang lingkungan hidup. Wacana memuat narasi-narasi yang cenderung *fictional* sehingga meningkatkan kompetensi kewarganegaraan mendorong individu untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi warga negara dibangun “membaca” narasi-narasi wacana dan keterlibatan aktivitas peduli lingkungan.

1.8. Struktur Organisasi Tesis

Bagian Struktur Organisasi Tesis akan menjelaskan sistematika penulisan tesis. Struktur organisasi penulisan dalam penulisan tesis ini merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6411/UN40/HK/2016 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2016 (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016). Tujuannya untuk memberikan gambaran umum kandungan tesis seperti, bab, subab dan bagian lainnya, serta keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lain yang membentuk kerangka tesis.

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan daftar, yang keseluruhannya saling memiliki keterkaitan. Bab I adalah bab Pendahuluan. Bab Pendahuluan merupakan bagian perkenalan tesis, terdiri dari (1) Latar Belakang Penelitian, bagian ini memaparkan konteks penelitian dan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini; (2) Rumusan Masalah Penelitian, bagian ini memberikan identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti dan perumusan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian; (3) Tujuan

Fazli Rachman, 2018

**KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Penelitian, cerimanan perumusan permasalahan yang menjadi tujuan mengapa penelitian dilakukan; (4) Manfaat Penelitian, bagian ini menjelaskan penting isu ini diangkat dalam penelitian dan memberi gambaran tentang nilai lebih atau kontribusi (manfaat) yang dapat diberikan oleh hasil penelitian; (5) Batasan Penelitian, bagian ini memberikan dalam penelitian ini. Tujuannya agar penelitian ini terfokus pada masalah yang akan diteliti; (6) Paradigma Penelitian, merupakan pandangan sementara terhadap masalah penelitian, dan; (7) Struktur Organisasi Penulisan, bagian ini menjelaskan gambaran struktur umum dalam tesis ini, sehingga memudahkan mengetahui tujuan dari setiap bagian-bagian dalam tesis ini.

Bab II, bab yang berisikan landasan teoritis. Bab II ini menyajikan ulasan teori-teori, analisis konsep-konsep, dail-dalil dan turunananya serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini memberikan konteks yang jelas untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari (1) Kajian Teoretis, bagian ini berisikan analisis teori, konsep, dalil penelitian yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bagian ini menjadi landasan agumentasi dan tingkat urgensi penelitian; (2) Penelitian Terdahulu, bagian ini nantinya akan menunjukkan beberapa penelitian yang terdahulu dan ulasannya. (3) Kerangka Berfikir, bagian ini berisi asumsi atau gambaran tentang pola antarhubungan dari kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti;

Bab III adalah Metode Penelitian, bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural. Bab ini menjelaskan bagaimana alur penelitian. Bab III ini terdiri dari (1) Pendekatan dan Desain Penelitian, berupa menjelaskan pendekatan dan desain penelitian yang digunakan dan alasan mengapa pendekatan dan desain penelitian tersebut digunakan dalam penelitian ini; (2) Partisipan dan Tempat Penelitian; (3) Pengumpulan Data; dan (4) Validitas dan Analisis Data.

Bab IV adalah bab Temuan dan Pembahasan. Bagian ini berisikan temuan temuan dari hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini terdiri dari, yakni (1) Temuan Penelitian, adalah hasil penelitian dan hasil yang menarik yang diolah sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dan; (2) Pembahasan Temuan Penelitian, bagian ini akan membahas temuan-temuan dari hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Fazli Rachman, 2018

*KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGANHIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Bab V adalah Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini terdiri dari, (1) Simpulan, berisikan pernyataan atau jawaban singkat dari analisis hasil penelitian. Simpulan terfokus memberikan jawaban atas jawaban pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah penelitian. (2) Implikasi, bagian ini akan membandingkan hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian tesis ini. (3) Rekomendasi, bagian ini akan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan kebaruan-kebaruan teori dan praktis pada lingkup kajian berdasarkan hasil temuan penelitian.

Fazli Rachman, 2018

*KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGANHIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Fazli Rachman, 2018

*KONSTRUKSI PARTISIPASI WARGA NEGARA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu